



KECAMATAN DAN KELURAHAN BERSTATUS LAYAK ANAK KLA, Pemkot Targetkan 'Naik Kelas'

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menargetkan status Kota Layak Anak (KLA) pada tahun ini bisa naik kelas. Dari sebelumnya mendapatkan predikat Nindya, naik menjadi Utama. Target itu seiring perkembangan wilayah yang sudah berstatus layak anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogya Edy Muhammad menjelaskan selama dua tahun berturut-turut sejak 2018 pihaknya mendapat predikat Nindya untuk program KLA. "Tahun ini kami targetkan bisa naik menjadi Utama," tandasnya, Rabu (4/3).

Salah satu upaya yang sudah dilakukan ialah mendorong status layak anak di wilayah. Saat ini seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Yogya bertahap harus sudah menyandang status layak anak.

Bahkan 18 puskesmas di Kota Yogya juga sudah ditetapkan sebagai puskesmas layak anak. Ke depan Pemkot juga akan mendorong seluruh layanan ke masyarakat bisa menuju hal serupa, termasuk tempat ibadah yang mengedepankan layak anak.

Dengan status layak anak yang sudah disandang oleh wilayah, maka diharapkan sudah tidak ada tindakan diskriminatif terhadap anak. "Masyarakat yang ada di wilayah tentunya harus memiliki komitmen yang kuat dalam memenuhi

hak anak maupun melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan. Keberhasilan wilayah layak anak dilihat dari komitmen masyarakat tersebut," urainya.

Tahapan pembentukan kecamatan dan kelurahan layak anak sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Khusus untuk kecamatan pertama kali dibentuk pada tahun 2016 dan tuntas hingga akhir 2019. Sedangkan untuk kelurahan baru mulai tahun 2017 dan menyisakan 10 kelurahan yang akan dibentuk di tahun ini.

Edy menambahkan, pihaknya tidak sebatas mendorong wilayah dalam menyandang status layak anak. Persoalan terkait pengelolaan dan pengembangannya juga terus dipantau.

Dari seluruh kecamatan dan kelurahan tersebut masing-masing dipilih satu wilayah sebagai percontohan pengelolaan sistem layak anak. Dengan begitu, wilayah yang mengalami persoalan bisa menyesuaikan dengan kecamatan atau kelurahan yang menjadi percontohan.

"Pengelolaan wilayah layak anak setidaknya harus ada sinergitas antarmasyarakat maupun instansi dalam memenuhi hak anak. Mulai hak untuk pendidikan, tumbuh kembang, kesehatan, bantuan hukum dan fasilitas umum," urainya. Oleh karena itu, predikat KLA yang ditargetkan naik kelas tidak sekadar capaian penghargaan melainkan hingga menysasar aspek kualitas. (Dhi)-g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005